



Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.

Peneliti Muda

teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ancaman ketidakstabilan pasokan dan harga pangan saat ini melanda dunia, termasuk Indonesia. Di dalam negeri kenaikan harga dan kelangkaan barang sedang terjadi yang diawali oleh komoditas minyak goreng, kedelai, dan daging. Belakangan, harga beberapa komoditas lainnya, seperti gula, cabai, beras, bawang merah, dan telur, ikut naik. Di triwulan pertama tahun ini, lonjakan harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan harga pangan dunia yang terlihat dari Indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FFPI) yang berada di level tertinggi dalam 50 tahun terakhir saja, tetapi juga akan dipengaruhi oleh tingginya permintaan menjelang puasa dan lebaran

China dan India menyikapi ancaman krisis pangan dengan menata kembali kebijakan ketahanan pangannya. China berfokus pada tanaman biji-bijian dan India pada kelapa sawit. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pangan yang stok dan harganya kerap bergejolak. Terlepas dari intervensi pemerintah yang dilakukan akhir-akhir ini dalam menjamin pasokan dan harga, berupa operasi pasar, atau kebijakan yang khusus dikeluarkan untuk kasus minyak goreng, yaitu *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO), solusi jangka panjang perlu dipikirkan oleh pemerintah agar permasalahan ini tidak berulang di masa depan.

Untuk komoditas pangan yang tidak bergantung impor, seperti *crude palm oil* (CPO) yang merupakan bahan baku produksi minyak goreng, kebijakan DMO menjadi salah satu bentuk proteksi dalam konteks perdagangan global. Kebijakan ekonomi tersebut saat ini tidak hanya dipraktikkan oleh Amerika Serikat dan China saja, tetapi juga banyak negara terhadap komoditas pangan andalannya, akibat dari kekhawatiran atas dampak perang Ukraina-Rusia. Selain pengendalian di hilir, peningkatan produksi di hulu juga dapat menjadi solusi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas kebun sawit yang telah ada. Meskipun Inpres No 8 Tahun 2018 yang mengatur soal moratorium lahan sawit baru telah kadaluarsa dan tidak kunjung diperpanjang, banyak pihak menilai bahwa moratorium tersebut akan meningkatkan perhatian pada peningkatan produktivitas sawit rakyat yang luasannya mencapai 41% dari total luas lahan sawit.

Sementara itu, untuk komoditas pangan yang masih bergantung impor, seperti kedelai, gandum, bawang putih, gula tebu, jagung, beras, ubi kayu, kacang tanah, dan lainnya, pemerintah harus serius melakukan pembudidayaan di dalam negeri. Presiden Joko Widodo pada 2015 telah mencanangkan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun. Program ini sepertinya perlu ditinjau ulang dengan target yang terukur dan dapat dicapai. Untuk padi dan jagung, peningkatan produktivitas dan penurunan nilai impor memang terjadi. Tetapi, untuk kedelai, gula, dan daging sapi nilai Impor justru kian meningkat. Program *Food Estate* (FEST) yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sejak 2020 belum terlihat menyasar pada komoditas pangan impor. Logikanya, jika FEST malah menyasar komoditas pangan yang

sudah tidak bergantung pada impor, justru hasil produksi FEST akan membanjiri pasar dan bersaing dengan produk pertanian lokal yang berimplikasi pada penurunan kesejahteraan petani lokal.

Catatan terakhir ditujukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru dibentuk melalui Perpres No. 66 Tahun 2021. Pendeklarasian kewenangan dan kuasa dari kementerian yang menyelenggarakan bidang perdagangan (terkait stabilisasi harga dan distribusi, kebutuhan ekspor dan impor pangan), dari kementerian yang menyelenggarakan bidang pertanian (terkait kebijakan cadangan pangan pemerintah serta penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga), dan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan BUMN (terkait penugasan Bulog dalam rangka kebijakan pangan nasional) menyebabkan badan ini memiliki kewenangan yang luas. Harusnya dengan integrasi kewenangan tersebut, koordinasi kebijakan pangan dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan lebih baik.

Atensi DPR

Sejak gejolak pasokan dan harga pangan dalam negeri mulai terjadi, DPR telah memberikan atensi terhadap masalah tersebut. Terakhir, DPR mengadakan Rapat Gabungan yang mengundang Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian yang ditunda sebanyak 2 kali kerena tidak dihadiri oleh Menteri Perdagangan (dan bersama Menteri Perindustrian pada Rapat Gabungan Kedua 15 Maret 2022). Ketidakhadiran menteri tersebut mendapat sorotan Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu terus memantau kinerja pemerintah dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan serta menjamin kejadian ini tidak berulang kembali di masa depan dengan mengembangkan program kerja yang mengurangi ketergantungan atas impor pangan, meningkatkan budidaya komoditas pangan yang masih bergantung pada impor, serta mengembangkan kebijakan pangan yang berpihak pada konsumsi domestik dan petani tradisional. Melalui upaya ini diharapkan, tidak hanya ketahanan pangan terwujud, tetapi juga kemandirian dan kedaulatan pangan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 12 Maret 2022;
Kompas, 7, 11, 12, 16 Maret 2022;
Rapat Gabungan Lintas Komisi (Komisi IV, VI, VII), 15 Maret 2022; dan
Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, 15 Maret 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

LAYOUTER



@puslitbkd_official

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekuinbang
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras S.
Dewi Wuryandani
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.